



Kebijakan Pendidikan dan Hegemoni Kekuasaan (Studi Kasus Kebijakan Baru SBMPTN dan Kepentingan Politik Menjelang Pilpres 2019)

Ristanti Indrayaningtias, Prabowo Yudho, Agus Machfud Fauzi*

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, 60213, Indonesia

*Correspondence: E-mail: Ristantiindrayaningtias16040564083@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan mulai dari bidang politik, kesehatan, hingga bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan 2019 oleh kemenristekdikti yaitu kebijakan mengenai seleksi SBMPTN 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pembuatan kebijakan SBMPTN 2019 dengan kepentingan politik Jokowi menjelang pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan melalui observasi dan wawancara, subyek dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMAN 4 Sidoarjo yang sedang duduk di kelas XII dan tahun 2019 menjadi pemilih pemula. Dalam menganalisis fenomena yang ada penelitian ini menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 11 Des 2021

First Revised 12 Jan 2022

Accepted 26 Feb 2022

First Available online 8 Mei 2022

Publication Date 08 Jun 2022

Kata Kunci:

*Hegemoni,
Kebijakan Pendidikan,
Kekuasaan*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan suatu konsep dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara berpikir dan bertindak pada suatu negara (Santika, 2020). Kebijakan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sebuah negara. Negara memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan baik kebijakan dalam hal politik, kesehatan, maupun dalam hal pendidikan (Mohammad dan Agustino, 2010). Apabila sebuah negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan-peraturan yang ada tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Kebijakan sendiri dibuat berdasarkan asas-asas umum yang ada pada masyarakat dan bisa diperbaharui apabila kebijakan tersebut dirasa kurang pas selama penggunaannya.

Pada definisi lainnya kebijakan merupakan sebuah perangkat keputusan yang diambil oleh para pemegang politik dalam rangka menentukan dan merumuskan sebuah tujuan dan cara bagaimana untuk mencapainya (Manshur, 2012). Terdapat beberapa tahapan dalam membuat sebuah kebijakan, pembuatan kebijakan oleh negara harus berdasarkan beberapa asas yang sudah ditetapkan. Penentu kebijakan paling tinggi dalam hal ini adalah presiden. Presiden menentukan dan merumuskan kebijakan dalam negaranya melalui menteri yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang bernama peraturan menteri.

Kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, sebuah kebijakan bersifat fleksibel maksudnya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat ini (Suhandi dan Robi'ah, 2022). Salah satu kebijakan yang penting dalam masyarakat yaitu kebijakan mengenai pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh negara dalam hal pendidikan, sebuah kebijakan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri melainkan ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang lain (Sy, 2022). Bahkan sampai ada istilah ganti menteri ganti kebijakan pendidikannya. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, mengapa setiap ganti pemimpin kebijakannya ikut berganti pula. Tak terkecuali kebijakan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi yang baru-baru ini ada kebijakan baru yang dibuat oleh kemenristek dikti.

Kebijakan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang dibuat oleh Kemenristek Dikti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan publik adalah kebijakan mengenai perubahan peraturan terhadap proses seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019 atau yang biasa disebut SBMPTN. Kemenristekdikti menentukan kebijakan tersebut terkait pembaharuan model dan proses seleksi yang berstandar nasional yang memiliki acuan pada keadilan, transparan, fleksibel, akuntabel serta mengikuti era teknologi digital yang sedang tumbuh sekarang ini. Kebijakan baru yang dibuat oleh kemenristek dikti untuk SBMPTN Tahun 2019 sangat jauh berbeda dari SBMPTN tahun 2018. Perbedaan yang paling signifikan ialah dihapusnya ujian berbasis kertas atau paper based test. Menurut kemenristek dikti seluruh rangkaian ujian tes akan menggunakan komputer. Selain itu, para peserta bisa melakukan tes sebanyak 2 kali dalam setahun apabila memang hasil tes yang diterima tidak cukup memuaskan.

Pada tahun politik kali ini jika dilihat dengan seksama sebelum dilaksanakannya pemilu tahun 2019. Kementerian di Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam membuat ataupun memperbaharui sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Proses pembaharuan kebijakan tersebut sangat santer sekali hubungannya dengan dunia perpolitikan sebagai penentu kebijakan yang terlebih lagi pada tahun 2019 juga akan dilakukan pesta demokrasi pemilihan presiden.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti masalah seperti pada penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Mada Sutapa yang mengangkat judul kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik. Dengan menjelaskan mengenai prinsip manajemen pendidikan sebagai pendidikan public goods bukan private goods yang dalam artian pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum yang diupayakan oleh pemerintah (Sutapa, 2008). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mukodi yang menjelaskan tentang dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia yang selalu bergantung pada visi kepemimpinan seorang presiden. Hal tersebut terjadi ketika pada masa orde lama hingga masa sekarang (Mukodi, 2016). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mujianto Solickin yang menjelaskan tentang kebijakan politik dan peran birokrasi terhadap keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakat (Solichin, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh As'ad Muzammil yang menjelaskan tentang pendidikan Islam yang terhambat oleh perpolitikan pemerintah dalam menyeimbangi konteks pendidikan nasional. Menurutnya pendidikan digunakan sebagai alat untuk menggiring rakyat dan umat kepada tujuan politik bagi keberlangsungan pembangunan bangsa (Muzammil, 2016). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna Dewi yang menjelaskan tentang kebijakan publik dan kebijakan pendidikan haruslah memiliki sebuah keterkaitan dalam kebijakan negara dalam berbagai segi bidang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Nilai pendidikan harus menjawai nilai perpolitikan dalam prinsip penyelenggaraan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori hegemoni yang digagas oleh Gramsci bahwa negara merupakan penguasa yang mendominasi. Penelitian ini berusaha mengkaji, menguraikan, dan mendeskripsikan data mengenai pembaharuan kebijakan SBMPTN tahun 2019 atas pelanggaran kekuasaan. Secara garis besar, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penggalan data primer dan data sekunder. Penggalan data primer dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses observasi dan wawancara. Proses observasi dilakukan dengan mengamati berita-berita yang muncul mengenai perubahan kebijakan sbmptn tahun 2019 pada media massa seperti media online dan televisi. Subyek dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMAN 4 Sidoarjo yang duduk dikelas XII.

Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara acak antara siswa-siswi jurusan IPA dan IPS. Subyek dari penelitian ini berjumlah empat orang. Penggalan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan buku referensi dan artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal penelitian yang selanjutnya diperlukan untuk membantu interpretasi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam (Apriyanto, 2014). Data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data primer dan data sekunder kemudian dianalisis. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cross-check data yang diperoleh dari antar informan. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pola SBMPTN 2018

Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang sering disebut SBMPTN merupakan salah satu jalur seleksi calon mahasiswa baru untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Munculnya kebijakan baru tersebut dilandaskan pada pembaruan sistem seleksi yang lebih transparan, adil, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang sekarang ini mengedepankan penggunaan teknologi di seluruh lini kehidupan. Seleksi melalui jalur SBMPTN dianggap merupakan ajang pertarungan utama bagi para siswa-siswi yang telah lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Tetapi problematika yang ada ketika mengikuti jalur SBMPTN di perguruan tinggi adalah sistem penilaian dan perengkingan yang tidak transparan. Karena ketidak transparan membuat para siswa-siswi calon mahasiswa baru banyak yang gagal masuk walaupun dirasa sudah mengerjakan dengan maksimal.

Kebijakan baru yang dibuat oleh kementerian riset, teknologi dan perguruan tinggi (Kemenristekdikti) memuat setidaknya enam aturan baru antara lain:

- (i) Penyelenggara tes bukanlah perguruan tinggi, melainkan lembaga tes tersendiri yang telah dibentuk bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP). Lembaga tersebut merupakan lembaga nirlaba yang bermitra dengan kemenristek dikti. Lembaga tersebut berfungsi untuk mengolah data nilai dari masing-masing camaba yang kemudian disetorkan ke perguruan tinggi yang dipilih.
- (ii) Alur seleksinya berbeda dengan SBMPTN yang lalu, tahapan selesi dimulai dari pendaftaran, tes, kemudian mendapatkan nilai, setelah itu barulah mendaftar ke PTN yang dituju. Jika SBMPTN sebelumnya camaba harus mendaftar dan memilih PTN terlebih dahulu, kebijakan SBMPTN yang baru ini berbeda. jadi ketika camaba sudah mengetahui hasil nilainya barulah memilih PTN sesuai dengan nilai yang diterima.
- (iii) Pelaksanaan tes menggunakan metode ujian berbasis komputer yang dilaksanakan di beberapa PTN yang dipilih, selain itu kemenristekdikti telah mengembangkan aplikasi untuk ujian tulis berbasis di android.
- (iv) Terdapat 2 materi pokok dalam ujian yaitu TPA (tes potensi akademik) dan TPS.
- (v) Jika pada kebijakan SBMPTN sebelumnya camaba hanya bisa melakukan tes satu kali dalam setahun maka berbeda dengan kebijakan baru SBMPTN 2019. Tes SBMPTN dapat dilakukan dua kali dalam periode waktu tertentu. Peserta yang mengikuti tes dua kali dapat menggunakan salah satu nilai hasil tes yang tertinggi untuk digunakan saat mendaftar PTN. Untuk biayanya kemenristekdikti mengatakan bahwa satu kali tes sebesar duaratus ribu.
- (vi) Kemenristekdikti menyatakan bahwa pelaksanaan tes akan diselenggarakan sebanyak 24 kali oleh pihak lembaga tes dalam satu tahun. Pelaksanaan tersebut akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yaitu pada bulan Maret 2019.



Gambar 1. Konferensi Pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Dengan adanya pembaharuan penerimaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri maka secara teknis ada beberapa yang diubah termasuk dihilangkannya paper based test atau ujian tulis berbasis kertas. Selain itu, menurut laman yang diunggah oleh tirtoid menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti terhadap penerimaan mahasiswa baru sekarang di pegang oleh sebuah institusi yang bernama lembaga tes masuk perguruan tinggi atau disingkat sebagai LTMPT tahun 2019. Pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya seleksi tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, SNMPTN dengan daya tampung minimal 20%, SBMPTN minimal 40% dan Seleksi Mandiri maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menurut M mengatakan bahwa pembaharuan ini merupakan sebuah bentuk revolusi pada penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, tak hanya sbmptn dilakukan di laptop atau pc namun, bisa digunakan pada perangkat yang berbasis android. Menteri M nasir juga mengatakan bahwa tujuan dari adanya pembaharuan tersebut adalah agar para calon mahasiswa ini merasa adil dan mereka tahu nilai yang mereka dapatkan.

3.2. Persepsi mengenai kebijakan SBMPTN 2019



Gambar 2. Pengerjaan UTBK (SBMPTN 2019)

Kebijakan baru mengenai sistem seleksi SBMPTN yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendapat menuai apresiasi dan kritikan dari kalangan siswa-siswi yang akan menjadi camaba. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 4 informan, 3 (Dinar, Zaifur, Lola) diantaranya mengatakan bahwa mereka antusias dan sangat mengapresiasi kebijakan baru tersebut. Kebijakan baru yang dicanangkan oleh kemenristekdikti tersebut dianggap dapat mempermudah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Selain itu dengan adanya transparansi nilai maka camaba yang melakukan tes dan hendak mendaftar jadi tau persaingan nilai di masing-masing PTN pilihan.

Informan mengatakan bahwa kebijakan SBMPTN sebelumnya terlalu tertutup dan membingungkan dalam proses penerimaannya. Siswa-siswi yang mengikuti SBMPTN dengan sistem yang lama merasa kebingungan mengenai persaingan yang ada karena tidak tau nilai minimal yang harus dicapai agar lolos ke PTN yang dituju. Ketika ditanya mengenai kepentingan politik untuk pilihan presiden tahun 2019 mendatang para informan mengaku tidak begitu paham. Ke empat informan merupakan pemilih pemula nantinya di tahun 2019 mereka akan memilih jokowi. Alasan dari pemilihan tersebut karena merasa jokowi pro dengan kebutuhan para milenial yaitu dengan mengembangkan pelayanan-pelayanan berbasis teknologi salah satunya SBMPTN 2019 mendatang.

Informan terakhir yang bernama Satria Bella tidak setuju dengan adanya kebijakan baru proses seleksi SBMPTN 2019. Menurutnya kebijakan SBMPTN 2019 terlalu menguntungkan pihak ketiga dan dapat membuat masalah. Salah satu masalah yang akan timbul menurutnya yaitu akan ada banyak calo-calo sebab pengerjaan yang katanya nanti bisa melalui android. Selain itu jadwal tes yang terlalu banyak bisa membuka celah bagi para pelaku kecurangan.

Informan juga berpendapat kalau kebijakan yang dibuat ini sebagai alat untuk menjaring pemilih pemula yang masih duduk di bangku akhir SMA oleh kubu Jokowi. Seperti mengambil hati para pemilih pemula dengan memberikan image pendidikan yang mudah diakses oleh semua kalangan dan mengedepankan pembangunan berbasis teknologi.

3.3. Kebijakan dan politik kepentingan

Informan terakhir yang bernama Satria Bella tidak setuju dengan adanya kebijakan baru proses seleksi SBMPTN 2019. Menurutnya kebijakan SBMPTN 2019 terlalu menguntungkan pihak ketiga dan dapat membuat masalah. Salah satu masalah yang akan timbul menurutnya yaitu akan ada banyak calo-calo sebab pengerjaan yang katanya nanti bisa melalui android. Selain itu jadwal tes yang terlalu banyak bisa membuka celah bagi para pelaku kecurangan. Informan juga berpendapat kalau kebijakan yang dibuat ini sebagai alat untuk menjaring pemilih pemula yang masih duduk di bangku akhir SMA oleh kubu Jokowi. Seperti mengambil hati para pemilih pemula dengan memberikan image pendidikan yang mudah diakses oleh semua kalangan dan mengedepankan pembangunan berbasis teknologi.

Dengan adanya pembaharuan penerimaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri maka secara teknis ada beberapa yang diubah termasuk dihilangkannya paper based test atau ujian tulis berbasis kertas. Selain itu, menurut laman yang di unggah oleh tirtio id menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh kemenristek dikti terhadap penerimaan mahasiswa baru sekarang di pegang oleh sebuah institusi yang bernama lembaga tes masuk perguruan tinggi atau disingkat sebagai LTMPT tahun 2019. Pola seleksi masuk PTN tahun 2019 akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya seleksi tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu, SNMPTN dengan daya tampung minimal 20%, SBMPTN minimal 40% dan Seleksi Mandiri maksimal 30% dari kuota daya tampung tiap prodi di PTN. Menurut M mengatakan bahwa pembaharuan ini merupakan sebuah bentuk revolusi pada penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, tak hanya sbmptn dilakukan di laptop atau pc namun, bisa digunakan pada perangkat yang berbasis android. menteri M nasir juga mengatakan bahwa tujuan dari adanya pembaharuan tersebut adalah agar para calon mahasiswa ini merasa adil dan mereka tahu nilai yang mereka dapat berapa. Periode tes dilakukan pada bulan maret hingga juni dan diadakan sebanyak 4x dalam seminggu.

Kebijakan SBMPTN 2019 yang telah ditetapkan oleh kemenristekdikti memuat beberapa kepentingan baik ekonomi maupun politik. Menjelang pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019 mendatang persaingan politik semakin panas. Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat dan mencalonkan diri pada tahun 2019 semakin mempercepat pembangunan di Indonesia baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kebijakan SBMPTN 2019 bisa dikatakan sebagai upaya Jokowi untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya ketika menjabat sebagai presiden. Selain itu juga bisa dianggap sebagai politik etis, dimana mereka membentuk karakter untuk menjaring suara dari para pemilih muda yang masih duduk di bangku akhir SMA. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kampanye Jokowi mengenai “kampanye anti janji palsu”. Strategi kampanye pihak Jokowi mengedepankan permainan data yang dianggap valid, data-data tersebut didasarkan pada pencapaian Jokowi selama menjadi presiden.



Gambar 3. Kebijakan SBMPTN 2019

Kebijakan yang ditetapkan oleh kemenristekdikti tersebut perlu ditelaah ulang, hal ini berkaitan dengan keamanan dan persaingan yang akan terjadi di antara camaba yang mendaftar. Kebijakan tersebut sebenarnya merupakan sebuah kebijakan yang dimana masih belum terbebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Dengan mengambil teori hegemoni milik antonio gramsci maka para penguasa akan mencari jalan lain dalam melenggangkan kekuasaannya. Gramsci mendefinisikan bahwa hegemoni merupakan sebuah bentuk kepemimpinan budaya yang dijalankan dan dipimpin oleh kelas yang berkuasa atau kelas elit. Hegemoni identik dijalankan oleh negara sebagai penguasa. Gramsci mengatakan bahwa hegemoni dijalankan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif, dan melalui campur tangan aparat negara seperti polisi. Dengan hal tersebut hegemoni kekuasaan yang mencakup sebuah persetujuan yang sah dengan mencakup beberapa elemen intelektual atas sebuah struktur politik yang ada.

Konsep hegemoni yang digagas oleh Gramsci juga merupakan sebuah konsep penguasaan terhadap kesadaran yang menghubungkan sebuah persetujuan antara kuasa dalam politik dan kaum intelektual. Dominasi kuasa dan pengetahuan merupakan sebuah kunci utama dalam melakukan sebuah pergerakan hegemoni. Hegemoni nampaknya tak hanya seputar tentang Negara dan masyarakat. Namun nampaknya hegemoni ini sendiri sudah masuk pada ranah dunia pendidikan. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Fenomena tersebut bisa terjadi seperti halnya mengenai kebijakan baru yang telah dibuat oleh kemenristek dikti ini. Unsur unsur hegemoni sangat kerasa sekali dalam kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut nampaknya digunakan oleh presiden jokowi dalam melenggangkan kekuasaannya pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Dengan embel-embel

kebijakan baru yang lebih adil dan transparan nampaknya kebijakan tersebut berusaha membuat stigma bahwa presiden Jokowi sangat mempedulikan pendidikan bagi para warganya dan juga hal tersebut tentunya untuk menarik suara dari kalangan pemilih yang masih berstatus pemilih umum. Sama seperti apa yang dikatakan Gramsci bahwa hegemoni dengan menggunakan kebijakan baru ini merupakan bentuk persetujuan antara kaum politik dominan dan para kaum intelektual yakni kementerian yang membuat kebijakan.

4. KESIMPULAN

Negara memiliki kekuasaan dan wewenang dalam membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan untuk warga negaranya. Kebijakan pendidikan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang. Pergantian kebijakan identik dengan kepentingan politik masing-masing golongan yang sedang berkuasa di tatanan atas. Konsep hegemoni yang digagas oleh Gramsci juga merupakan sebuah konsep penguasaan terhadap kesadaran yang menghubungkan sebuah persetujuan antara kuasa dalam politik dan kaum intelektual. Dominasi kuasa dan pengetahuan merupakan sebuah kunci utama dalam melakukan sebuah pergerakan hegemoni. Dengan embel embel kebijakan baru yang lebih adil dan transparan nampaknya kebijakan tersebut berusaha membuat stigma bahwa presiden Jokowi sangat mempedulikan pendidikan bagi para warganya dan juga hal tersebut tentunya untuk menarik suara dari kalangan pemilih yang masih berstatus siswa tingkat akhir SMA yang mayoritas merupakan pemilih pemula dan untuk menjaring suara mahasiswa. Nampak bahwa Jokowi membangun sosok pada dirinya agar dekat dan dapat mengambil suara dari kalangan pemuda melalui politik etisnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, H. (2014). Jaringan sosial tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Paradigma*, 2(2), 1-10.
- Manshur, A. (2012). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 10(2), 163-177.
- Mohammad & Agustino. (2010). Demokrasi & hegemoni: Suatu analisis kedinamikan politik Malaysia. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 2(12), 839-866.
- Mukodi. (2016). Refleksi dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia. *Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah*, 3(2), 141-152.
- Muzammil, As'ad. (2016). Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dari orde lama hingga orde reformasi. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183-198.
- Santika, I. W. E. (2020). Pendidikan karakter pada pembelajaran daring. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 3(1), 8-19.
- Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan tantangan kurikulum baru: Analisis peran guru dalam kebijakan kurikulum baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5936-5945.

Sutapa, Mada. (2008). Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(10), 12-16.

Sy, S. H. (2022). Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 697-706.